

Koperasi Dalam Perspektif Hukum Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Era Globalisasi

Silvina Viola Sabila¹, Via Geneti Lomban Toruan²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: violasalsabila2904@students.unnes.ac.id¹, viagenety@students.unnes.ac.id²

Abstract

Globalisasi berasal dari kata globe dan ization. Globe diartikan sebagai bola bumi atau peta bumi yang bulat. Kata globe kemudian berubah menjadi global. Artinya, secara umum dan keseluruhan, secara bulat atau bersangkut paut mengenai dan meliputi seluruh dunia (mengglobal atau mendunia). Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang mengarah pada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Globalisasi merupakan suatu proses yang terbentuk dari tatanan, aturan, atau sistem tertentu. Aturan tersebut diberlakukan bagi seluruh bangsa di dunia sehingga batas wilayah suatu negara dan globalisasi juga merupakan bagian proses dalam penyebaran atau perluasan sosial budaya, sistem ekonomi dan pola kehidupan. Dalam globalisasi tentu akan mengalami beberapa gejala yang nyata dan sangat cepat mempengaruhi seluruh dunia. Proses dalam Globalisasi akan terjadinya penyebaran secara meluas dan interaksi berbagai media sosial di antaranya ialah : Sosial Budaya, Ekonomi, Keamanan dll. Koperasi merupakan salah satu kegiatan perekonomian dalam kehidupan yang telah berkembang mengikuti perkembangan era globalisasi. Koperasi biasanya dipimpin oleh Pemilik koperasi itu sendiri dan memiliki beberapa anggota setiap bagiannya dengan modal dan untung dinikmati secara kebersamaan dalam penggajian, namun ada juga koperasi yang dijalankan sendiri yang artinya tanpa adanya anggota dengan modal dan untung yang dirasakan sendiri. Menurut **Said Hamid Hasan** koperasi merupakan kumpulan dari orang yang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat banyak. Sedangkan menurut "UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam pasal 1 ayat (1) bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi". Meskipun koperasi merupakan salah satu kegiatan perekonomian dalam ekonomi lokal warga harus mampu menjamin kesejahteraan berdasarkan era globalisasi ditengah adanya tantangan dan peluang yang ditawarkan secara perkembangan zaman yang semakin modern. Dan meskipun koperasi masih termasuk perekonomian secara lokal maka dari itu sistem perkoperasian harus mampu menyusun strategis bersaing dengan perusahaan multinasional dengan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 09 Nov 2024
Available online 17 Nov. 2024

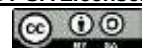
Keywords :

Koperasi, Peningkatan Ekonomi, Masyarakat, Globalisasi



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192048>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Pengembangan koperasi sebagai badan usaha memerlukan sistem kelembagaan yang mendukung aktivitas ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Prinsip koperasi menekankan pentingnya pengelolaan usaha oleh, dari, dan untuk masyarakat, serta memastikan partisipasi aktif mereka, tidak hanya dalam hasil ekonomi tetapi juga dalam peningkatan martabat sosial. Oleh karena itu, dukungan konkret dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, sangat penting untuk keberhasilan pengembangan koperasi. Untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pengembangan koperasi, perlu disadari bahwa pengelolaan manajemen dan kesiapan sumber daya manusia koperasi masih membutuhkan perbaikan. Hal ini penting agar koperasi dan pelaku ekonomi nasional siap menghadapi perubahan dalam ekonomi global. Berdasarkan survei IMD, daya saing Indonesia menurun dari peringkat 33 pada tahun 1995 menjadi 41 pada tahun 1996, dengan indikator

sektor keuangan dan SDM mengalami penurunan, meskipun ada sedikit peningkatan dalam deregulasi, penguasaan teknologi, dan ekonomi domestik.

Pengembangan kegiatan ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai pilihan kelembagaan. Namun, untuk aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan, diperlukan pendekatan yang memungkinkan partisipasi luas masyarakat guna menjamin terciptanya pemerataan. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah melalui koperasi dan menjadikannya bagian dari sistem kerja sama dengan berbagai pelaku usaha di tingkat nasional. Koperasi, berbeda dengan kelompok komunitas pada umumnya, merupakan organisasi yang lebih dekat dengan masyarakat akar rumput, sekaligus sejalan dengan prinsip ekonomi pasar. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang ahli: *"Koperasi, tidak seperti kelompok tradisional, adalah model organisasi yang dirancang agar sesuai dengan prinsip modern dalam pengelolaan keuangan dan pembukuan seperti perusahaan komersial, meskipun memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda."*

Secara sederhana, kelompok masyarakat akar rumput sering menghadapi masalah efisiensi dan efektivitas ketika menjalankan aktivitas ekonomi secara individu. Dari sudut pandang sosiologis, terdapat alasan kuat untuk mendukung keberadaan tindakan kolektif (collective action). Rasa kebersamaan dalam kelompok (in-group feeling) dapat menjadi respons terhadap ancaman ekonomi, terutama di era persaingan ketat yang berpotensi mengancam sistem ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi, keberadaan koperasi dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi. Ada dua mekanisme utama yang memungkinkan usaha bersama mencapai efisiensi yang lebih tinggi: *economies of scale* dan *economies of scope*. Penggabungan usaha kecil, seperti yang umum pada usaha rakyat, menjadi usaha kolektif yang lebih besar memungkinkan efisiensi melalui penggunaan bersama sumber daya produksi, manajemen, dan aspek ekonomi lainnya. Selain itu, kebersamaan ini memungkinkan perluasan cakupan usaha, sehingga setiap anggota memiliki akses lebih besar terhadap peluang ekonomi. Di tingkat operasional, kebersamaan juga membantu mengurangi risiko secara kolektif dan mengatasi masalah asimetri informasi. Melalui koperasi, risiko bersama dapat diminimalkan, sehingga potensi kerugian juga berkurang. Selain itu, jaringan koperasi yang terintegrasi mampu mengatasi asimetri informasi, baik secara vertikal, seperti ketidaktahuan pelaku di sektor produksi terhadap kondisi di sektor pemasaran, maupun dalam aspek lainnya. Dengan demikian, koperasi menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan memperbaiki akses informasi bagi anggotanya.

Meskipun koperasi memiliki banyak keunggulan, pengembangannya di negara berkembang masih membutuhkan dukungan dari pihak eksternal. Menumbuhkan koperasi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat lapisan bawah secara alami seringkali menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks ini, keterlibatan pihak ketiga, termasuk perguruan tinggi, dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Pengamatan para ahli di berbagai negara Asia menunjukkan bahwa peran pihak ketiga, khususnya pemerintah, masih sangat penting dalam pengembangan koperasi. Sebagaimana diungkapkan: *"Di negara-negara berkembang di Asia, gerakan koperasi diperkenalkan oleh pemerintah."*

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya dalam konteks hukum dan tantangan yang dihadapi di era globalisasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara komprehensif dengan mengutamakan perspektif anggota koperasi, pengelola, dan pemangku kebijakan. Data yang diperoleh bersifat naratif dan kontekstual, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang dinamika koperasi sebagai entitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Yang Ada Mempengaruhi Pengembangan Koperasi di Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global

Globalisasi berasal dari kata globe dan ization. Globe diartikan sebagai bola bumi atau peta bumi yang bulat. Kata globe kemudian berubah menjadi global. Artinya, secara umum dan keseluruhan, dalam globalisasi tentu akan mengalami beberapa gejala yang nyata dan sangat cepat mempengaruhi seluruh dunia. Proses dalam Globalisasi akan terjadinya penyebaran secara meluas dan interaksi berbagai media sosial di antaranya ialah : Sosial Budaya, Ekonomi, Keamanan dll. koperasi merupakan kumpulan dari orang yang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat banyak yang diatur oleh “UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pada saat ini proses penerapan koperasi telah berjalan secara meluruh secara lokal akan tetapi dengan bergandengan beberapa tantangan yang dialami oleh pihak koperasi termasuk dalam pengelolaan bagian modal. Menurut Baga et al (2009) menyatakan ada beberapa keunggulan yang dimiliki koperasi diantaranya:

1. Menghasilkan lebih banyak output dengan biaya rata-rata yang lebih rendah dan
2. Mampu bersaing karena koperasi
3. Bisa membuat perjanjian,
4. Mampu mengurangi biaya transaksi karena prinsip dua identitas anggota, sehingga anggota akan berusaha sebaik mungkin untuk kemajuan koperasi,
5. dan dapat mengurangi resiko ketidakpastian
6. Membeli atau menjual barangnya kepada koperasi melalui pasar internal.

Posisi koperasi di Indonesia pada dasarnya memfokuskan pada sistem kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset dan dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Sejak awal mula hingga saat tentu sistem ini masih diminati oleh pemerintah. “Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa koperasi harus menjadi pusat perekonomian Indonesia sejak awal pendirian dan harus memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak. Ini mencegah koperasi untuk menghindari kepentingan pemerintah”

Dalam bahasa Latin *Cum* yang artinya dengan dan *Aperari* yang berarti bekerja artinya yang termasuk dalam kegiatan ekonomi lokal dengan beberapa prinsip yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat antara lain :

1. Bersifat keanggotan,
2. Sukarela & Terbuka,
3. Demokratis & Partisipasi dan,
4. Kebebasan.

Dari keempat prinsip tersebut tentu dilindungi oleh UU yang telah berlaku demi hukum dikarenakan kegiatan perkoperasian tidak jauh dari beberapa faktor. Secara badan hukum koperasi memiliki beberapa tantangan dalam menghadapi era globalisasi, antara lain;

1. Tujuan membuka usaha, pimpinan koperasi harus memahami dan memenuhi kebutuhan kelompok anggotanya dengan mempertimbangkan keinginan anggota koperasi, persyaratan kolektif setiap kelompok mungkin berbeda.
2. Ada pemenuhan suatu dana yang efektif antara anggota dan koperasi, dan biaya ini lebih rendah daripada biaya transaksi non-koperasi.
3. Pengetahuan atas pengendalian diri dan anggota koperasi,
4. Koperasi produksi harus mereorganisasi dan mengubah strategi operasional mereka.

Dengan demikian, koperasi dapat beradaptasi dengan era globalisasi dan sistem perekonomian Indonesia dengan dukungan pemerintah. Koperasi tidak seharusnya diancam oleh perkembangan teknologi, informasi dan gaya hidup masyarakat, menangkap keuntungan dari perkembangan tersebut dan memanfaatkannya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi bangsa selama revolusi. Sementara dampak positif dari koperasi adalah bahwa spesialisasi dan perdagangan dapat membuat penggunaan faktor produksi global menjadi lebih efisien dan meningkatkan produksi global, dan

masyarakat dapat memperoleh manfaat dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk peningkatan pendapatan.

Strategi Yang Dapat Diterapkan Oleh Koperasi Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat di Era Globalisasi

Tantangan yang Dihadapi

Setelah lebih dari 30 tahun pembangunan, kita menyadari bahwa struktur ekonomi nasional belum mencapai hasil yang diharapkan. Struktur ekonomi masih didominasi oleh segelintir pengusaha besar, menciptakan ketergantungan yang berisiko. Ketika beberapa perusahaan besar terguncang, dampaknya terasa luas, seperti yang terbukti dalam krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 hingga kini. Hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki penyangga ekonomi yang memadai, seperti jaringan usaha kecil dan menengah yang kokoh sebagaimana yang dimiliki oleh banyak negara.

Kondisi ini memerlukan komitmen yang tegas untuk mengutamakan pemerataan, termasuk memberikan kesempatan usaha yang lebih besar kepada koperasi. Sayangnya, peran koperasi seringkali hanya dianggap sebagai pelengkap. Inti bisnis dikuasai oleh swasta dan BUMN, sementara koperasi hanya mendapatkan bagian kecil. Ini terjadi karena koperasi dianggap belum mampu mengimbangi dinamika dunia bisnis yang semakin kompleks dan profesional.

Jika ditelusuri, ada beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan koperasi masih jauh dari harapan. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi kendala internal dan eksternal.

Kendala Internal:

1. Keterbatasan Sumber Daya Profesional: Koperasi kekurangan tenaga profesional untuk mengelola organisasi dengan baik. Di sisi lain, jumlah tenaga profesional di Indonesia masih terbatas, sementara kebutuhan akan mereka terus meningkat.
2. Minimnya Modal Swadaya: Mayoritas anggota koperasi berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, sehingga sulit untuk mengumpulkan modal secara mandiri. Selain itu, skala usaha koperasi yang kecil menyulitkan akumulasi modal dan pendapatan usaha.
3. Rendahnya Kesadaran Berkoperasi: Anggota dan pengelola koperasi umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, sehingga mereka kurang memahami pentingnya prinsip koperasi. Keterbatasan tenaga terampil juga berdampak pada rendahnya kemampuan pengelola dalam memberikan edukasi kepada anggota dan masyarakat.

Kendala Eksternal:

1. Persepsi yang Beragam: Pemahaman tentang pentingnya koperasi dalam pembangunan nasional belum seragam di antara pemegang kebijakan, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Hal ini menimbulkan kebingungan, apakah koperasi lebih diutamakan karena badan hukumnya atau prinsip kebersamaannya.
2. Minimnya Dukungan Lembaga Keuangan: Perbankan cenderung kurang memberikan perhatian kepada koperasi, karena jumlah koperasi yang layak secara ekonomi masih sangat sedikit dibandingkan dengan badan usaha lainnya.
3. Iklim Usaha yang Kurang Kondusif: Persaingan dengan badan usaha lain, monopoli, dan oligopoli pasar membuat koperasi semakin sulit berkembang dalam sistem ekonomi pasar.
4. Aturan yang Menghambat: Regulasi untuk koperasi dinilai kaku dan membatasi ruang geraknya, seperti aturan terkait sumber modal dan wilayah kerja, yang berbeda dengan fleksibilitas yang diberikan kepada badan usaha swasta.

Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini, kehadiran koperasi yang mandiri sangatlah penting. Sebagai bagian dari ekonomi rakyat, koperasi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi berbagai masalah nasional, seperti penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan Pembangunan.

Strategi Pengembangan

Koperasi sering kali sulit berkembang menjadi besar dan maju, karena lebih banyak berfungsi sebagai unit ekonomi kecil yang bergerak lambat. Di tengah masyarakat, kepercayaan terhadap koperasi pun masih rendah, sehingga koperasi lebih banyak dipandang sebagai idealisme daripada kenyataan, baik sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun wadah kegiatan ekonomi rakyat.

Oleh karena itu, meninjau kembali asas kemandirian koperasi menjadi sangat penting, karena lemahnya kemandirian terbukti berhubungan erat dengan stagnasi perkembangan koperasi. Prinsip kemandirian ini tidak hanya terkait kemampuan material dalam membentuk modal, tetapi juga mencakup aspek mental dan spiritual, seperti rasa solidaritas dan kesadaran individu untuk bekerja sama. Sikap percaya diri anggota koperasi untuk memperbaiki kondisi hidup melalui kerja sama menjadi langkah awal menuju keberhasilan koperasi dalam menjalankan roda perekonomian. Kemandirian tidak berarti menolak bantuan eksternal seperti kredit, yang justru dapat mendorong perkembangan koperasi dan mengatasi kekurangan modal untuk usaha dengan nilai ekonomis dan sosial yang tinggi. Namun, bantuan tersebut harus proporsional, sesuai dengan kapasitas modal internal dan kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola risiko. Agar koperasi berkembang secara mandiri, diperlukan kebijakan seperti menciptakan iklim usaha yang kondusif, pendekatan bisnis dalam pengelolaan, peningkatan partisipasi anggota, edukasi masyarakat, dan pengurangan intervensi pemerintah. Koperasi juga harus diperlakukan sebagai organisasi bisnis untuk mengatasi inefisiensi yang ada, tanpa mengabaikan prinsip sosialnya. Pendekatan bisnis yang profesional memungkinkan koperasi untuk bersaing, berinovasi, dan menemukan pasar baru, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Untuk mendukung koperasi sebagai organisasi bisnis yang efektif, diperlukan manajer berkualitas dengan jiwa kewirausahaan, kemampuan manajerial, dan dedikasi yang tinggi. Sayangnya, banyak manajer koperasi masih kurang terlibat dalam promosi dan pendidikan berkelanjutan bagi anggota karena lebih berfokus pada idealisme daripada praktik nyata. Dengan manajemen yang lebih pragmatis dan inovatif, koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi yang mampu bersaing dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Peningkatan Partisipasi Anggota

Dalam persaingan bisnis yang semakin kompleks, perusahaan tidak hanya berfokus pada menarik pelanggan baru, tetapi juga menciptakan kepuasan pelanggan untuk mempertahankan loyalitas mereka. Hal ini menjadi tantangan besar bagi koperasi, karena anggotanya berperan ganda sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Oleh karena itu, koperasi harus berupaya mempertahankan kesetiaan anggotanya dengan bertumpu pada dua aspek penting: partisipasi anggota dan efisiensi usaha. Partisipasi anggota sangat bergantung pada kemampuan koperasi dalam mengelola kepentingan ekonomi anggotanya secara efektif dan efisien, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan modal koperasi. Sebaliknya, efisiensi usaha memungkinkan koperasi memberikan insentif yang layak kepada anggotanya sehingga memotivasi mereka untuk terlibat lebih aktif. Kedua unsur ini saling berkaitan, seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, kegiatan usaha, dan pengawasan mencerminkan prinsip-prinsip dasar koperasi, sementara efisiensi usaha adalah langkah logis untuk memastikan koperasi mampu bertahan dalam lingkungan ekonomi berbasis pasar. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran anggota untuk berpartisipasi sering kali menjadi hambatan. Banyak anggota lebih mementingkan kepentingan pribadi, tidak disiplin, atau kurang memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap koperasi. Kondisi ini membuat pengurus atau manajer koperasi terpaksa mencari sumber daya dari luar untuk memenuhi kebutuhan operasional koperasi. Masalah komunikasi yang tidak efektif antara pengelola dan anggota juga memperburuk situasi, sehingga partisipasi anggota tetap rendah. Selain itu, arus konsumerisme yang kuat sering kali membuat anggota tergoda oleh penawaran dari pihak lain yang dianggap lebih memuaskan, seperti program hadiah yang menarik. Untuk menghadapi tantangan ini, koperasi perlu memperkuat pola komunikasi, meningkatkan kesadaran anggotanya, dan memastikan pengelolaan koperasi tetap berlandaskan prinsip kemandirian dan profesionalisme.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Koperasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan taraf hidup sosial dan ekonomi masyarakat, terutama kalangan bawah. Sebagai lembaga yang penting dalam pembangunan, koperasi dapat berkontribusi dengan menyediakan informasi yang relevan tentang kondisi lokal dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, koperasi mampu menyesuaikan kebijakan umum dengan kebutuhan spesifik masyarakat, serta berperan dalam perencanaan dan penetapan tujuan

pembangunan. Melalui penyediaan input produksi dan pelayanan yang diperlukan, koperasi membantu anggotanya mengembangkan kemampuan berorganisasi secara efektif sehingga kebutuhan dan aspirasi mereka dapat lebih terakomodasi. Namun, peran koperasi dalam pembangunan sering kali terhambat oleh berbagai masalah. Tantangan seperti rendahnya kepercayaan terhadap pengurus, skala usaha yang kecil, kurangnya tenaga pengelola profesional, metode produksi tradisional, kemampuan pemasaran yang lemah, dan kesulitan akumulasi modal menjadi hambatan utama. Lebih dari itu, koperasi sering kali dianggap hanya sebagai alat pelengkap program pemerintah, bukan sebagai lembaga yang benar-benar mandiri dan berdaya. Pemahaman masyarakat tentang koperasi juga masih minim, sehingga partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi cenderung rendah. Untuk membangun koperasi yang mandiri, pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang koperasi sangat penting. Sebagai organisasi ekonomi rakyat yang bertujuan meningkatkan pendapatan, koperasi harus terus memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai peran dan fungsinya. Cara paling efektif untuk masyarakat dengan pendidikan rendah adalah dengan menunjukkan keberhasilan nyata koperasi dalam mengelola kegiatan organisasi dan usaha yang bermanfaat bagi anggotanya. Keberhasilan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami manfaat berkoperasi dan tertarik menjadi anggota. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa koperasi yang sukses masih sulit ditemukan, sehingga citra negatif sering kali melekat. Hal ini justru menjauhkan masyarakat dari koperasi, yang akhirnya memperlambat pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang koperasi harus dilakukan secara konsisten, agar koperasi dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih luas.

Pengurangan Intervensi Pemerintah

Intervensi pemerintah dalam pengembangan koperasi pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat kemajuan dan pertumbuhan koperasi, namun kenyataannya justru menghambat perkembangan tersebut. Intervensi yang berlebihan, mulai dari pendirian koperasi, pengelolaan usaha, pengurusan kredit, hingga pengembangan koperasi, sering kali tidak mendorong kreativitas dan inisiatif anggota. Alih-alih mendorong kemajuan, pengaruh pemerintah sering kali membuat koperasi menjadi terikat dan lebih loyal kepada pihak yang memberi intervensi, bukan kepada anggotanya. Hal ini menciptakan hubungan yang tidak sehat antara koperasi primer dan sekunder, menjadikan koperasi lebih mirip sebagai bagian dari birokrasi pemerintah daripada sebagai badan usaha yang mandiri. Selain itu, intervensi dalam penetapan pengurus juga berisiko menurunkan kepercayaan anggota, karena pengurus yang ditunjuk oleh pemerintah tidak selalu memiliki kedekatan dengan anggota koperasi. Dampak dari kebijakan pemerintah ini dapat dilihat dalam dua hal utama: pertama, terciptanya ketergantungan yang saling menguntungkan antara koperasi dan pemerintah, yang pada akhirnya membuat koperasi kehilangan kemandirian; kedua, koperasi dipandang sebagai alat pemerintah, bukan sebagai organisasi yang dikelola oleh dan untuk anggotanya. Intervensi ini sangat mengurangi swadaya koperasi, meskipun secara formal tidak terlihat, namun di lapangan dampaknya sangat nyata. Proses pembentukan koperasi, pemilihan anggota, hingga pertanggungjawaban keuangan, sering kali diintervensi oleh pemerintah, bahkan hingga pembangunan kantor dan fasilitasnya. Pendekatan top-down yang diterapkan dalam banyak koperasi menyebabkan kurangnya inisiatif dan peran serta masyarakat, terutama di desa-desa. Koperasi desa sering kali lebih berfungsi sebagai lembaga pemberi layanan daripada sebagai usaha mandiri yang didorong oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan rendahnya evaluasi dan pengambilan keputusan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi, yang akhirnya mengurangi efektivitas koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

SIMPULAN

Berdasarkan dari kajian yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kegiatan perekonomian secara lokal dalam era globalisasi serta beberapa perlawanan/tantangan tentu memiliki dampak positifnya. Dan koperasi harus menangkap dampak positif dari perkembangan tersebut sehingga dampak positif yang menjadi peluang koperasi untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi bangsa dalam revolusi.

Koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian rakyat dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Namun, koperasi menghadapi sejumlah tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang menghambat perkembangannya. Kendala internal seperti keterbatasan sumber daya profesional, modal swadaya yang minim, dan rendahnya kesadaran berkoperasi di kalangan anggota menjadi faktor utama yang memperlambat kemajuan koperasi. Sementara itu, kendala eksternal seperti persepsi yang beragam tentang koperasi, kurangnya dukungan lembaga keuangan, iklim usaha yang kurang kondusif, dan regulasi yang menghambat juga menjadi hambatan yang signifikan.

Selain itu, intervensi pemerintah yang berlebihan, meskipun dimaksudkan untuk mendukung perkembangan koperasi, justru sering kali memperburuk situasi dengan menciptakan ketergantungan dan mengurangi kemandirian koperasi. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi koperasi untuk memperkuat kemandirian, meningkatkan partisipasi anggota, dan mengurangi intervensi yang berlebihan dari pemerintah. Dengan pendekatan bisnis yang lebih profesional, peningkatan efisiensi usaha, dan pengelolaan yang lebih mandiri, koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Pemberian pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang koperasi juga sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dan mengurangi citra negatif yang ada, sehingga koperasi dapat berkembang menjadi lembaga yang lebih kuat dan efektif.

REFERENSI

- Suyono, A.G. dan Muchtar, I dkk. 1996. Koperasi dalam Sorotan Pers. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anaroga, P. dan Widiyanti, N. 1992. Dinamika Kopemsi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damanhuri, D. 1996. Konglomerat, Kesenjangan dan Persaingan Global. Media Indonesia, Oktober 1996.
- Rachbini, D.J. 1998. Koperasi Pendekatan Bisnis dan Politik. Kompas, Maret, 1998.
- Ropke, J. 2000. Ekonomi Kopenisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutojo, H. 1995. Mencari Terapi Pembinaan Koperasi di Perkotaan. Warta Koperasi, No. 61 Tahun XIV
- Sumual, D.E. 1998. Ekonomi Politik Perkoperasian Indonesia. Manajemen Usahawan Indonesia, No. 07 Tahun XXVII.
- Mubyarto. 1997. Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media.
- Syamni, G., & Abd Majid, M. S. (2016). Efficiency of Saving and Credit Cooperative Units in North Aceh, Indonesia. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 5(2), 99-118.
- Wirasmita, Y. 2000. Pengembangan Kewirausahaan di Lingkungan Koperasi, Makalah, Juni.
- Putra, I. P. P. R., & Juliarsa, G. (2018). Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Pertumbuhan Koperasi pada Profitabilitas dengan Non Performing Loan Sebagai Moderasi. E-Jurnal Akuntansi, 929.